



# LAPORAN PENYELENGGARAAN SPIP TRIWULAN I TAHUN 2021

**KANTOR WILAYAH**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Nomor : W14.PW.02.03 - 1223

31 Maret 2021

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Hal : **Laporan Penyelenggaraan SPIP**  
**Triwulan I Tahun 2021**

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- di

Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan I Tahun 2021, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

#### **1. Kemajuan Penyelenggaraan SPIP**

Realisasi pelaksanaan kemajuan penyelenggaraan SPIP sampai dengan triwulan I mencapai 23% (rincian terlampiran), dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Pemahaman yang sama tentang SPIP oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta sangat diperlukan. Hal ini untuk memudahkan membangun pengendalian dalam rangka penerapan SPIP di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta. Kegiatan yang dilakukan dalam memberikan pemahaman kepada seluruh pejabat dan pegawai sebagaimana yang telah dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta berupa Sosialisasi Target

Tingkat Maturitas SPIP, Pendampingan Penguatan Tingkat Maturitas SPIP yang meliputi sosialisasi unsur dan sub unsur SPIP.

1) *Kegiatan yang mendukung pencapaian target.*



**1.1.** Rapat dilaksanakan di ruang rapat Kanwil Kemenkumham DIY, Jalan Gedongkuning, Yogyakarta, Rabu (20/1/2021). Rapat ini juga sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.12.PR.01.03 Tahun

2020 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020, serta persiapan pemenuhan dokumen data dukung Target Kinerja Tahun 2021 di lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY.



**1.2.** Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DIY mengikuti entry meeting virtual dengan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkumham Komjen Andap Budhi Revianto serta Auditor Utama Keuangan Negara

I BPK RI. Pertemuan membahas berkaitan dengan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020. Pertemuan dilaksanakan secara virtual dengan dihadiri serta diikuti secara virtual oleh para pejabat Unit Eselon I dan para Kepala Kantor Wilayah, Senin (25/1/2021).



**1.3.** Pertemuan Budi Ateh dengan Kakanwil Budi Sarwono juga terkait dengan persiapan audit yang akan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kanwil Kemenkumham DIY sendiri sebelumnya telah bertekad memberikan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan

akuntabel untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pertemuan dilaksanakan di ruang kerja Kakanwil Kemenkumham DIY, Rabu (10/2/2021).



**1.4.** Kepala Kantor Wilayah melakukan sidak di Ruang Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY. berharap ada perubahan dan peningkatan di Ruang Pelayanan Publik menjadi lebih keren dan

modern. Evaluasi pelayanan publik mutlak diperlukan dalam proses menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).



**1.5.** Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY. Koordinasi terkait pelaksanaan workshop Manajemen Risiko dan sosialisasi maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Rapat koordinasi dilaksanakan di Kantor BPKP Perwakilan DIY, Jalan Parangtritis, Kamis (25/3/2021).



**1.6.** Guna memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan melalui Sistem Informasi Pemerintah (SPIP), jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Penguatan Target Tingkat Maturitas SPIP dan Workshop Penerapan Manajemen Resiko yang diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis jajaran Kanwil Kemenkumham DIY secara virtual dan langsung dari masing-masing unit kerja kantor wilayah. Rabu (31/03/21).

2. Dalam pencapaian target terdapat beberapa hambatan antara lain sebagai berikut :
  - a) Kurangnya pemahaman dalam mengimplementasikan identifikasi risiko dan analisa risiko terkait dengan perencanaan pengawasan;
  - b) Kurangnya dukungan Satgas SPIP dalam penyelenggaraan SPIP yang dapat menjangkau seluruh unit kerja pemilik risiko;
  - c) Masih terbatasnya sarana prasarana termasuk dukungan penyedia teknologi informasi untuk peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP.
  - d) Perlunya meningkatkan komitmen antar Divisi di Jajaran Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja;
  - e) Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY;

- f) Penetapan tujuan dan sasaran strategis harus menjadi pelajaran dalam rangka meningkatkan Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY pada tahun berikutnya;
- g) Melakukan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY dan *stakeholder* lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.

## 2. Rencana Tindak pada Triwulan Selanjutnya

Atas capaian tersebut, rencana tindak triwulan I adalah:

### 1. Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut:

- a) Lingkungan Pengendalian  
Meningkatkan kapabilitas dan peran pengawasan satuan tugas SPIP, dengan menyusun pedoman atau petunjuk teknis pada setiap penugasan serta meningkatkan kapastitas SDM melalui diklat-diklat teknis pengawasan intern.
- b) Penilaian Risiko  
Pendampingan dalam pelaksanaan aturan/kebijakan internal terkait penilaian risiko, melakukan identifikasi dan penilaian risiko, mendokumentasikan hasil penilaian risiko dan daftar risiko yang dibuat secara berkala.
- c) Kegiatan Pengendalian  
Membangun sistem pengumpulan informasi kinerja yang mampu menyajikan data secara *uptodate*, terverifikasi antar unit kerja dan dapat diperbandingkan antar tahun dan Melakukan reuiu dan evaluasi berkala atas Indikator Kinerja Utama.
- d) Informasi dan Komunikasi  
Mengidentifikasi dan menentukan titik kritis yang mempengaruhi pencapaian kinerja/target IKU dan Menetapkan saluran informasi informal atau terpisah yang bisa berfungsi apabila jalur informasi normal gagal.
- e) Pemantuan  
Melakukan pemantauan berkelanjutan dan identifikasi kelemahan penerapan pengendalian intern yang sudah ada yaitu atas kebijakan, pedoman atau SOP yang sudah disusun dan dilaksanakan.

### 2. Rencana Aksi triwulan Berikutnya:

- a) Pentingnya mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY;
- b) dibutuhkan peningkatan komitmen antar Divisi di Jajaran Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja;

- c) Penetapan tujuan dan sasaran strategis agar menjadi pelajaran dalam rangka meningkatkan Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY pada periode berikutnya;
- d) Melakukan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY dan *stakeholder* lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.



Yogyakarta, 31 Maret 2021  
Kepala Kantor Wilayah,

  
Budi Argap Situngkir  
NIP 197510211998011001